

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK DI KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF GURU PENGGERAK PROGRAM IN YOGYAKARTA CITY

Oleh: Hilma Yumna Najati, Universitas Negeri Yogyakarta
hilmayumna.2020@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori Edward III dan menunjukkan bahwa implementasi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik yang didukung oleh beberapa aspek seperti komunikasi antar pelaksana dan komunikasi pelaksana dengan kelompok sasaran, b) Sumber daya manusia, anggaran, dan finansial yang memadai, c) Disposisi yang berjalan sesuai dengan pedoman PGP, dan d) Struktur birokrasi dengan mekanisme dan adanya struktur organisasi. Faktor pendukung berupa a) Komunikasi dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada CGP, serta melakukan koordinasi dengan BBGP DIY, b) Sumber daya didukung dengan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan, c) Disposisi dari pelaksana yang berjalan dengan baik, d) Struktur Birokrasi dengan mekanisme dan struktur organisasi. (3) Sedangkan faktor penghambatnya yaitu a) Adanya beberapa CGP yang mengalami kesalahan pemahaman terkait komunikasi, b) Kurangnya kemampuan manajemen waktu yang dimiliki PGP.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Pelatihan Guru, Pendidikan Guru Penggerak.

Abstract

This research aims to describe the implementation of mobility teacher education in Yogyakarta City, as well as its supportive and inhibitory factors. This research is qualitative descriptive research. Data analysis is done with data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research were analyzed using Edward III's theory and showed that the implementation of the Pendidikan Guru Penggerak (PGP) program in Yogyakarta City has gone well, supported by some aspects such as inter-executor communication and executive communication with the target group, b) adequate human resources, budget, and finance, c) disposition that runs in accordance with the guidelines of PGP, and d) bureaucratic structure with mechanisms and the presence of an organizational structure. (3) Whereas the inhibitory factor is a) there are some CGPs who suffer from misunderstandings related to communication, b) the lack of time management capabilities of the PGP.

Keywords: Education Policy, Pendidikan Guru Penggerak, Teacher Training

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan aspek dasar dalam peningkatan kemajuan suatu negara. Kualitas pendidikan dalam suatu bangsa menjadi salah satu penentu kemajuan bangsa tersebut. Dengan kata lain, kemajuan suatu bangsa atau negara dapat dilihat dari bagaimana kualitas pendidikan di bangsa dan negara tersebut (Nur & Kurniawati, 2022).

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Guru sebagai tenaga kependidikan yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sehingga penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan sejalan dengan peningkatan pengembangan kompetensi bagi guru. Keadaan kompetensi guru di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Neraca Pendidikan Daerah (2019) yang menunjukkan rata-rata nilai uji kompetensi guru (UKG) berada pada angka 54 dari skala 100. Oleh karena itu, diperlukan program pengembangan untuk peningkatan kompetensi guru demi mewujudkan hasil belajar siswa yang optimal.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru adalah Pendidikan Guru Penggerak. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan Nomor No. 1302 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak menjelaskan bahwa program ini merupakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru agar dapat menciptakan hasil belajar siswa yang lebih optimal.. Pendidikan guru penggerak ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan daring dan luring, lokakarya, konferensi, serta pendampingan selama enam bulan bagi calon guru penggerak.

Pendidikan Guru Penggerak merupakan program yang dikoordinasikan secara pusat oleh Direktorat Jenderal Pelaksanaan program ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan di tingkat daerah, pemerintah pusat bekerja sama dengan masing-masing daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.

Pelaksanaan program PGP di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dengan koordinasi dari UPT Kemendikbud tingkat wilayah yaitu Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) di Provinsi D.I. Yogyakarta. Pembentukan BBGP DIY didasari dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak pasal 2 ayat (1) yang menyatakan

bahwa unit kerja ini bertugas untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pihak-pihak di dalam pelaksanaan PGP. Salah satu daerah yang berada dalam wilayah BBGP DIY yaitu Kota Yogyakarta. Pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta yang berkoordinasi dengan BBGP DIY.

Pendidikan guru penggerak dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dalam jaringan (daring) serta pendampingan kelompok melalui lokakarya dan pendampingan individu secara luar jaringan (luring). Proporsi kegiatan terdiri atas 70% belajar di sekolah (*on-the-job learning*), 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik. Desain pendidikan guru penggerak tentu sudah dibuat dengan sebaik mungkin. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut masih ditemukan adanya kendala. Dilansir dari laman www.tribunnews.com pada tanggal 24 Oktober 2021 21:19, pelaksanaan pendidikan guru penggerak selama ini terdapat permasalahan. Wakil Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir, mengatakan bahwa pendidikan guru penggerak memiliki masalah dalam pelaksanaannya seperti waktu pelaksanaan panjang yang mengganggu pekerjaan guru, kendala

jaringan dalam pelaksanaan pelatihan, dan penugasan program yang berat.

Berdasarkan data pra-observasi yang telah dilakukan pada 4 Agustus 2023 menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan lembaga yang berwenang dalam urusan pendidikan di daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di wilayah Kota Yogyakarta. Sesuai dengan Pedoman Pendidikan Guru Penggerak yang menyebutkan bahwa pengorganisasian program PGP melibatkan Dinas Pendidikan kota. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta yang merupakan panjang tangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi mempunyai peranan yang penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan guru penggerak di wilayah Kota Yogyakarta. Dindikpora Yogyakarta bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pendidikan guru penggerak sebagai fasilitator, penyelenggara, pemantauan, pengawasan, dan pemberdayaan. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memenuhi segala kebutuhan sumber daya manusia seperti instruktur, asesor, pengajar praktik, fasilitator, dan calon guru penggerak sebagai peserta program.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mendeskripsikan implementasi Program Guru Penggerak di Kota Yogyakarta, faktor pendukung dan

juga penghambat implementasi program tersebut. Kegunaan penelitian ini secara komprehensif diharapkan mampu berkontribusi dalam mengembangkan informasi dan konsep-konsep mengenai implementasi PGP dan berguna sebagai dasar penelitian sejenis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nugroho (2014: 35) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian dengan tujuan mengetahui nilai variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rentang 7 bulan yang dimulai pada 1 November 2023– 4 Juni 2024. Tempat penelitian ini adalah di Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Target/Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, Teknik ini merupakan sebuah metode *non random sampling* dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset (Lenaini, 2021).

Subjek pada penelitian ini yaitu: pelaksana teknis PGP, fasilitator PGP, pengajar praktik PGP, dan guru penggerak.

Prosedur

Penelitian ini dinilai dari adanya program Pendidikan Guru Penggerak yang dirancang Kemendikbudristek dengan tujuan meningkatkan kemampuan para guru di Indonesia. Program PGP ini dapat diikuti oleh semua guru di Indonesia dengan melakukan seleksi terlebih dahulu.

Daerah pelaksanaan program ini ditunjuk secara langsung dari Kemendikbudristek. Salah satu daerah yang melaksanakan program ini adalah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan program ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan koordinasi dari pusat dan juga koordinasi dari BBGP DIY.

Dalam melakukan penelitian, langkah awal yang diambil oleh peneliti yaitu menghubungi pihak Dindikpora Yogyakarta untuk menyampaikan izin penelitian di Dindikpora dan satuan pendidikan yang merupakan satuan kerja guru penggerak di Kota Yogyakarta. Setelah itu peneliti menyusun instrumen pengumpulan data yang akan dilakukan berupa panduan wawancara, panduan observasi, dan panduan dokumentasi.

Penelitian berjalan dengan lancar dan peneliti mendapatkan jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian dari

narasumber. Selanjutnya ke tahap berikutnya yaitu menyusun hasil penelitian yang dimulai dengan mentranskrip hasil wawancara, mengelaborasi dengan kajian teori, membuat pembahasan, dan menyusun kesimpulan serta hasil dari penelitian.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber asli atau pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi seperti wawancara dengan narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data pendukung adalah observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Teknik analisis interaktif ini terdiri dari tiga tahap yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pendidikan Guru Penggerak di Kota Yogyakarta

Hasbi dkk., (2021) memaparkan pendapatnya bahwa kata kebijakan mengandung makna garis haluan (*policy*). Garis haluan, mengandung makna rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak mengenai pemerintahan atau organisasi). Sedangkan pengertian implementasi kebijakan pendidikan menurut Rusdiana (2015: 146) merupakan pengupayaan agar rumusan-rumusan kebijakan pendidikan berlaku di dalam praktiknya. Tinus dalam Baharuddin & Saidang (2020) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Bila kebijakan yang telah dirumuskan dipandang sebagai suatu proses, maka langkah selanjutnya adalah implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat kita ketahui bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan tindak lanjut dari perumusan kebijakan dalam bentuk pelaksanaan di lapangan yang membutuhkan banyak pihak agar implementasi ini dapat mencapai keberhasilan dan menyelesaikan masalah pendidikan.

Pendidikan Guru Penggerak menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1302/B/PD.00.02/2022 tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak merupakan kegiatan pengembangan profesi melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik; aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik; serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebhinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri.

Pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Dirlitjen GTK Kemendikbud dalam pelaksanaan program di daerah. BBGP DIY dan pemerintah Kota Yogyakarta yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta saling berkoodinasi dalam implementasi program ini terkait persiapan dan pelaksanaa.

Peneliti menggunakan teori implementasi milik Edward III dalam

membahas implementasi pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta. Tempat aspek pokok di dalam penggunaan teori ini yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Edward dalam Indiahono (2009: 31), menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi dan salah satu dari empat komponen tersebut adalah komunikasi. Komunikasi menunjuk bahwa dalam setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Edward III dalam Widodo (2010:97) menyatakan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan

yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Ada pun komunikasi yang terjalin di pelaksana pendidikan guru penggerak memang sudah cukup baik. maka berdasarkan penjelasan di atas, maka komunikasi sudah baik hal ini dibuktikan dengan bagan alur komunikasi PGP di Kota Yogyakarta. Komunikasi tersebut dilakukan oleh para pelaksana dan kelompok sasaran dalam bentuk persuratan, sosialisasi, rapat koordinasi teknis, bimbingan teknis, dan pemanfaatan Whatsapp group. Komunikasi yang dilakukan juga sudah jelas dan secara konsisten dibuktikan dengan wawancara yang telah dilakukan. Namun ternyata, terdapat kesalahan pemahaman yang bagi peserta pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta.

2. Sumber Daya

Dalam teori implementasi Edward III terdapat beberapa jenis sumber daya yang dipaparkan, adapun jenis-jenis sumber daya dalam implementasi PGP di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menurut Edward III adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Dalam pendidikan guru penggerak di Kota

Yogyakarta sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan program ialah Dirjen GTK, BBGP DIY, seksi pengembangan kapasitas di bidang Pendidikan Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi Dindikpora Yogyakarta, dan peserta program PGP yang merupakan guru di satuan pendidikan TK, SD, dan SMP di Kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaan program sudah berjalan dengan sumber daya yang memadai. Namun dalam pelaksanaan program terdapat hal yang menghambat yaitu terkait dengan peserta program. Dari observasi yang dilakukan, para guru memiliki banyak kegiatan sehingga terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok dengan peserta PGP lainnya dalam program. Berdasarkan dengan teori implementasi Edward III sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta sudah baik dengan adanya sumber daya yang memadai dari para pelaksana, tim pendukung, dan kelompok sasaran.

b. Sumber daya peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di

Kota Yogyakarta peralatan yang digunakan menyesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jika pelaksanaan kegiatan secara daring, maka peralatan yang dibutuhkan adalah internet, ruang pertemuan daring, dan gawai pribadi. Terkait internet terdapat bantuan dari sumber daya anggaran untuk para pelaksana dan juga guru sebagai kelompok sasaran. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara luring seperti lokakarya, dibutuhkan banyak peralatan yang mendukung terkait dengan penunjang program. Hal tersebut merupakan hal yang perlu disiapkan dan dipenuhi agar para peserta PGP dapat lebih fokus dan produktif.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sumber daya peralatan untuk melaksanakan program PGP di Kota Yogyakarta baik untuk kegiatan secara daring maupun luring.

c. Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran menjadi komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Edward III mengatakan bahwa sumber daya anggaran adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sumber daya finansial dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta, anggaran bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan

Teknologi yang diturunkan melalui BBGP DIY. Penggunaan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan program seperti insentif, sarana prasarana, konsumsi, uang jalan, dan bantuan internet bagi para pelaksana dan kelompok sasaran. Dukungan anggaran ini sudah dilakukan dengan baik. Namun, dalam implementasi pernah mengalami penundaan anggaran sehingga pelaksanaan juga tertunda.

Berdasarkan dengan teori implementasi Edward III sumber daya anggaran dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta sudah baik dengan adanya dukungan anggaran dan memadai.

3. Disposisi

Edward III mengatakan bahwa disposisi berkaitan dengan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta selama ini berjalan dengan sikap pelaksana menunjukkan sikap komitmen dan kerja keras dalam melakukan tugas serta perannya masing-masing. Dari para pelaksana dan sasaran dalam implementasi program PGP di Kota Yogyakarta dengan peran dan fungsinya masing-masing, akhirnya memunculkan

sinergi sehingga mereka dapat memahami tugasnya dan pelaksanaan program ini menjadi maksimal. Pelaksanaan aspek disposisi ini berjalan dengan baik dan semestinya sehingga mendukung pelaksanaan program.

Berdasarkan dengan teori implementasi Edward III, disposisi yang ada dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta sudah baik dengan pelaksana dan sasaran yang melakukan tugas dan perannya masing-masing dengan baik juga.

4. Struktur Organisasi

Edward III mengatakan bahwa aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu pertama adalah mekanisme dan yang kedua adalah struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standard operating procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. Adanya struktur birokrasi dalam sebuah program bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan keselarasan rencana dan pelaksanaan. Mekanisme implementasi pendidikan guru penggerak diatur dalam Surat Keputusan Dirjen GTK Kemendikbudristek No. 1302 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak. Struktur organisasi dalam implementasi PGP di Kota Yogyakarta dibentuk sesuai dengan alur komunikasi dan

disposisi seperti yang ada dalam hasil penelitian.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak sudah dilakukan dengan baik dengan adanya uraian tugas dan peran para pelaksana dan juga adanya struktur organisasi program.

Faktor Pendukung Implementasi Program Pendidikan Guru Penggerak

Edward III dalam Hasbullah (2016: 99) menyebutkan empat aspek dalam implementasi sehingga berjalan secara efektif yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan program ini. Sesuai dengan aspek implementasi Edward III, aspek komunikasi telah terpenuhi dengan adanya transmisi dalam bentuk komunikasi antar pelaksana dan kelompok sasaran, aspek sumber daya yaitu adanya sumber daya manusia, peralatan, serta anggaran yang memadai, aspek disposisi yaitu para pelaksana yang melakukan tugasnya dengan baik, dan struktur birokrasi yaitu adanya peran pelaksana dan adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan program. Hal tersebut harus dipertahankan untuk pelaksanaan program di angkatan-angkatan berikutnya.

Faktor Penghambat Implementasi Program Pendidikan Guru Penggerak

Edward III dalam Hasbullah (2016: 99) menyebutkan empat aspek dalam implementasi sehingga berjalan secara efektif yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika empat aspek tersebut tidak berjalan dengan baik, maka dapat menghambat pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta selain adanya faktor pendukung, ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Diantaranya yakni terdapat beberapa CGP masih ada yang mengalami kesalahan pemahaman terkait komunikasi, pencairan anggaran yang tertunda, dan kurangnya kemampuan manajemen waktu yang dimiliki peserta CGP dalam melaksanakan program. Dari hal tersebut diharapkan para peserta diberikan bekal dalam manajemen waktu sehingga nantinya terjadi peningkatan kualitas untuk angkatan berikutnya dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru.

Dari penelitian yang dilakukan, maka dari sudut kebijakan dan teori Implementasi Edward III. Maka, yang hal yang perlu dikuatkan yaitu mengenai peningkatan dalam komunikasi, perencanaan anggaran, dan pembekalan manajemen waktu peserta CGP karena ternyata menghambat pelaksanaan

pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian selama ini dengan diperkuat dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Maka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Berikut merupakan penjelasan terkait hal tersebut.

1. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin dalam implementasi Pendidikan guru penggerak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah berjalan dengan baik. Adapun komunikasi terjalin berupa persuratan, sosialisasi, rapat koordinasi teknis, bimbingan teknis, dan pemanfaatan *Whatsapp group*. b. Sumber daya Sumber daya dalam implementasi pendidikan guru penggerak sudah terpenuhi dengan baik. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut.

2. Sumber Daya

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dengan adanya sumber daya dari pelaksana dan sasaran yang memadai.

b. Sumber daya anggaran
Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dengan tercukupinya anggaran yang diberikan pemerintah guna pelaksanaan program.

c. Sumber daya peralatan
Sumber daya peralatan dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta sudah tersedia dengan baik.

3. Disposisi

Dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta disposisi yang dilakukan yaitu berupa pelaksana dan sasaran yang melakukan perannya dan saling berintegrasi sehingga menciptakan disposisi yang baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dengan adanya mekanisme peran tugas pelaksana dan sasaran, serta adanya struktur organisasi.

Saran

Setelah melakukan penelitian terkait implementasi pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Adanya kebijakan terkait dengan penguatan komunikasi yang lebih intensif dengan para guru agar

guru semakin paham pentingnya program ini untuk mengembangkan diri. Selain itu, menambahkan materi terkait dengan manajerial waktu untuk para guru.

2. Bagi guru Guru diharapkan untuk mengikuti program ini untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan diri dengan memahami serta mengikuti program dengan komitmen tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, & Saidang. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di SDN No. 39 Cakke. Edumaspul: *Jurnal Pendidikan*, 4(2), 189-204. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i2.717>
- Fahlevi, Fahdi. (2021, 24 Oktober). *PGRI: Banyak Masalah Dalam Implementasi Program Guru*. Diakses 5 Maret 2024 dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/24/pgri-banyak-masalah-dalam-implementasi-program-guru-penggerak>.
- Hasbi, I., Maharani, dkk. (2021). *Kebijakan Publik. Widina Bhakti Persada*. www.penerbitwidina.com
- Hasbullah. (2016). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Joko Widodo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 14 Tahun 2022 pasal 2 ayat (1)*, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor No. 1302 Tahun 2022*, tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak.
- Neraca Pendidikan Daerah. (2019). Editor, 2019.
- Nugroho, R. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nur, F., & Kurniawati, A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusi. *AoEJ: Academy of Education Journal* (Vol. 13, Nomor 1).
- Republik Indonesia. (2003) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003*, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan : Dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia. Bandung: Pustaka Setia.
- Saldana, Miles, & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publications